
Span Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

Recognizing the artifice ways to get this book **Span Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara** is additionally useful. You have remained in right site to start getting this info. get the Span Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara partner that we come up with the money for here and check out the link.

You could buy guide Span Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara or acquire it as soon as feasible. You could speedily download this Span Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara after getting deal. So, in imitation of you require the book swiftly, you can straight get it. Its therefore categorically simple and so fats, isnt it? You have to favor to in this song

Span Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
Downloaded from [ftp.vaganly.com](http://vaganly.com)
by guest

**SIMPSON
LIZETH**

Manajemen

Uang

Persediaan:

Integrasi

Aktivitas

Pembukuan

dan Pelaporan

di Satuan

Direktorat

Sistem

Perbendahara

an, Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Sejalan dengan pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia melalui paket Undang-undang bidang Keuangan Negara, reformasi di bidang perbendaharaan dilakukan melalui pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Salah satu aspek dalam	pengembangan SPAN adalah aspek pengembangan proses bisnis (Business Process Improvement) . Pengembangan proses bisnis dalam SPAN meliputi beberapa modul mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan. Pelaporan (Reporting) merupakan salah satu proses bisnis dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan	keuangan oleh entitas akuntansi dan pelaporan. Penyempurnaan proses bisnis Pelaporan pada dasarnya dilakukan dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah. Penyempurnaan ini juga dimaksudkan untuk mendukung tercapainya salah satu target pemerintah dalam pengelolaan keuangan
---	---	--

negara yaitu untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Business Process Improvement dalam Modul Pelaporan meliputi penyempurnaan mekanisme pelaporan melalui penggunaan SPAN single database yang terintegrasi dalam lingkup	Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) ini akan menghindarkan adanya information discrepancy yang dihasilkan oleh entitas-entitas yang berbeda dalam lingkup BUN sebagaimana yang sering terjadi saat ini. Selain itu, konsep ini akan mempercepat alur pelaporan karena entitas yang lebih tinggi tidak lagi harus menunggu dari entitas di bawahnya	untuk menerima laporan, melainkan entitas tersebut bisa memenuhi sendiri laporan yang dibutuhkan dengan langsung mengakses ke database. Dampak positif lainnya dari penggunaan single database adalah adanya simplifikasi dalam proses rekonsiliasi laporan keuangan (penyederhanaan level rekoniliasi). Namun demikian, konsekuensinya
--	---	---

a adalah perlunya penyempurnaan prosedur rekonsiliasi di level terendah (KPPN-Satker) yakni perlunya dilakukan reformulasi prosedur rekonsiliasi. Pengembangan lainnya dalam Modul Pelaporan adalah penyempurnaan laporan keuangan itu sendiri. Dalam konteks pengembangan SPAN, akan dihasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap. Di samping laporan keuangan berbasis kas yang merupakan statutory report yaitu Laporan Realisasi Anggaran, juga akan dihasilkan laporan keuangan berbasis akrual yang akan memberikan informasi keuangan yang lebih komprehensif sehingga lebih relevan dan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Disamping itu, Modul Pelaporan juga akan memfasilitasi disusunnya sebuah laporan keuangan pemerintah yang dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics atau GFS). Laporan keuangan berbasis Sistem GFS ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis

perbandingan antarnegara (cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Sebuah terobosan dalam penyusunan laporan internal juga menjadi concern dan pemikiran dalam pengembangan proses bisnis Pelaporan. Laporan internal yang bersifat manajerial (managerial report) yang dihasilkan Kementerian	Keuangan (Ditjen Perbendaharaan) begitu banyak jumlahnya. Disamping kajian untuk melakukan penyederhanaan, juga dilakukan kajian terhadap prosedur penyajian dan penyusunannya yang bisa memenuhi prinsip-prinsip kemudahan, kecepatan dan ketepatan. Konsep "User Defined Reporting" merupakan sebuah gagasan yang layak dipertimbangkan untuk	memenuhi kebutuhan ini . Konsep ini memungkinkan setiap user (pengguna) dari laporan keuangan untuk bisa mendesain dan mencetak sendiri kebutuhan laporannya dengan cara mengakses database secara langsung. Last but not least, Modul Reporting juga merancang pengintegrasian Laporan Keuangan dengan Laporan Kinerja. Rancangan ini tidak lepas dari konsep
---	---	--

<p>“Performance Based Budgeting” yang mengarahkan pengguna anggaran untuk menyusun anggarannya dengan berbasis kinerja. Laporan Kinerja yang selama ini dihasilkan dari sistem yang terpisah akan dipadukan dengan Laporan Keuangan dalam satu sistem SPAN. Modul ini akan menjadi bahan diskusi dan pijakan awal bagi pengkajian dan</p>	<p>pengembangan proses bisnis Pelaporan berikutnya, sehingga apa yang menjadi harapan bagi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat terwujud.</p> <p>Reformulasi Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat</p> <p>Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan</p> <p>Salah satu</p>	<p>fungsi laporan sebagai alat manajerial yaitu bahwa laporan keuangan mampu digunakan sebagai alat analisis kebijakan fiskal dan kebijakan makro, di mana laporan tersebut harus memenuhi standar internasional dan bisa diperbandingkan (comparable) dengan laporan keuangan negara lain. Sebagai contoh dari bentuk laporan keuangan</p>
---	---	---

<p>yang bisa memenuhi fungsi tersebut adalah laporan keuangan yang berbasis sistem GFS (Government Finance Statistics). Laporan keuangan berbasis Sistem GFS dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF) yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1986. GFS berisi uraian atas sistem makro ekonomi yang dirancang untuk</p>	<p>mendukung analisis fiskal suatu negara. Tujuan utama sistem GFS adalah memberikan suatu kerangka kerja konseptual dan kerangka akuntansi yang komprehensif sehingga dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan fiskal suatu negara baik disektor pemerintah maupun di sektor publik yang lebih luas. Lebih lanjut</p>	<p>dinyatakan bahwa sistem GFS dirancang untuk menyediakan data statistik yang memungkinkan para pengambil keputusan dan para analisis untuk mempelajari perkembangan/progress dalam operasi keuangan, posisi keuangan, dan kondisi likuiditas dari sektor pemerintah dan sektor publik secara konsisten dan sistematis. Data yang dihasilkan dari sistem GFS yang lengkap</p>
--	---	--

<p>dapat digunakan untuk menguji/menginvestigasi area khusus dari kegiatan operasi pemerintah. Harmonisasi antara sistem GFS dengan sistem statistik ekonomi makro lainnya menunjukkan bahwa data dari sistem GFS dapat dikombinasikan dengan data dari sistem lain untuk mengukur perkembangan sektor pemerintah atau sektor publik dalam hubungannya dengan sektor</p>	<p>ekonomi lainnya. <i>Indonesia</i> Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Reformasi di bidang keuangan Negara, yang antara lain diwujudkan dalam bentuk reformasi penganggaran dan perbendaharaan, mengagendakan sejumlah penyempurnaan terutama di bidang proses bisnis, teknologi informasi dan</p>	<p>manajemen perubahan. Dalam penyempurnaan ini, pengintegrasian fungsi-fungsi sistem penganggaran dan perbendaharaan menjadi dasar bagi upaya pencapaian akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan Pemerintah yang dapat diandalkan. Sistem pengelolaan keuangan negara yang modern, transparan dan akuntabel menjadi tujuan yang akan dicapai</p>
--	---	---

dalam reformasi penganggaran dan perbendaharaan, yang diwujudkan dalam bentuk sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN). Sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan reformasi, maka penyempurnaan proses bisnis adalah hal utama yang dilaksanakan untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang profesional, transparan dan akuntabel. Salah satu langkah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tersebut adalah dengan pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan pemerintah dan penyampaian laporan keuangan pemerintah yang andal dan tepat waktu. Hal ini dapat dicapai dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan akuntansi sesuai dengan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah. Selain penyempurnaan proses bisnis, untuk mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara yang diwujudkan dalam bentuk penyampaian laporan keuangan yang andal

dan tepat waktu, penerapan teknologi informasi akan sangat diperlukan. Dengan adanya kejelasan tujuan, sasaran, dan manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara melalui SPAN ini, diharapkan SPAN dapat menghasilkan suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang andal demi terwujudnya pengelolaan

keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penyempurnaan proses bisnis akuntansi dilatarbelakangi oleh amanat UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara untuk menggunakan akuntansi berbasis akrual. Dengan adanya kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk

menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara, maka SPAN akan memfasilitasi proses bisnis akuntansi yang menggunakan basis akrual sebagai dasar pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Basis akrual ini akan dipergunakan untuk pelaporan keuangan, namun penyusunan anggaran tetap menggunakan basis kas. Perubahan

<p>basis akuntansi dari semula cash towards accrual (kas menuju akrual) menjadi basis akrual membawa dampak terhadap perubahan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan basis kas untuk penganggara n dan basis akrual untuk akuntansi dan pelaporan, maka akan dihasilkan laporan keuangan pemerintah berbasis kas dan berbasis akrual.</p>	<p>Laporan berbasis kas berupa laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, sedangkan laporan keuangan yang berbasis akrual akan meliputi Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Modul General Ledger dan Chart of Accounts atau juga modul akuntansi</p>	<p>dalam SPAN, disusun dengan mengacu pada RPP Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan fitur-fitur General Ledger pada Oracle, karena belum adanya kebijakan akuntansi akrual hingga saat ini. Penyempurna an proses bisnis akuntansi dalam modul ini diiringi dengan penyusunan sistem akuntansi, framework Bagan Akun Standar dan</p>
--	--	--

<p>framework akuntansi akrual. Perubahan yang difasilitasi oleh modul ini antara lain perubahan sistem akuntansi di KPPN, berupa penyatuan sistem akuntansi umum (SAU) dan sistem akuntansi kas umum negara (SAKUN) menjadi satu sistem akuntansi yang terintegrasi. Dengan sistem yang terintegrasi ini, akan diakomodir pencatatan secara basis</p>	<p>kas dan akrual sehingga dapat dihasilkan laporan berbasis kas berupa laporan realisasi anggaran dan laporan berbasis akrual seperti neraca dan laporan operasional. Sejalan dengan perubahan basis akuntansi dari kas menuju akrual menjadi akrual, maka selain sistem akuntansi, perubahan Bagan Akun Standar menjadi agenda</p>	<p>penting dalam penyempurnaan sistem akuntansi pemerintah. Perubahan Bagan Akun Standar terutama pada struktur dan akun-akunnya ini dikarenakan adanya penerapan basis akrual, manajemen komitmen, dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga terdapat penambahan akun-akun akrual seperti beban persediaan, akun komitmen, dan informasi</p>
---	--	---

<p>mengenai output. Selain perubahan sistem akuntansi dan bagan akun standar, perubahan juga terjadi pada modul akuntansi yang ada pada proses bisnis di modul GL. Proses bisnis akuntansi yang ada pada modul General Ledger, dimulai dari proses bisnis yang ada pada modul lain, yang disebut juga subledger. Subledger tersebut terdiri dari Budget</p>	<p>Preparation (BP), Management of Spending Authority (SA), Commitment Management (BC), Payment Management (PM), Government Receipt (GR), dan Cash Management (CM). Transaksi-transaksi yang dicatat pada masing-masing subledger tersebut akan dikirim ke GL sehingga jurnal entries akan terposting di GL. Proses bisnis tersebut terdiri dari proses pemutakhiran</p>	<p>BAS, penyiapan opening balance, proses penyiapan kurs atas transaksi berbasis valas, koreksi, rekonsiliasi internal, dan konsolidasi. Dengan penyempurnaan proses bisnis akuntansi, diharapkan SPAN dapat memfasilitasi perubahan proses bisnis di bidang penganggaran dan perbendaharaan sehingga dapat mewujudkan sistem pengelolaan</p>
---	--	---

keuangan negara yang andal.
PANDEMI COVID19 DAN DIGITALISASI UMKM
 Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan System of administration on government appropriations and expenditures in Indonesia for fiscal year of 2013; includes CD-ROM containing related laws, decrees of the Ministry of

Finance, and regulations of Directorate General of Treasury.
Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
 Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Sejak tahun 2007, penunjukan Bank Operasional I (BO I) dilakukan melalui lelang terbuka di antara bank pemerintah dan bank pembangunan

daerah yang berminat menjadi BO I KPPN. Bank pemenang lelang akan menjadi BO I suatu KPPN selama periode tiga tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama. Rekening BO I yang bersaldo nihil merupakan perwujudan konsep Treasury Single Account (TSA) pada sisi pengeluaran negara. Untuk periode kedua, sejak tahun 2010, terpilih delapan bank umum yang

menjadi mitra KPPN, yang terdiri atas tiga bank pemerintah dan lima bank pembangunan daerah. Seiring dengan berakhirnya periode kedua pada Desember 2011, maka diperlukan langkah-langkah persiapan pengadaan bank yang akan menjadi penyalur pembayaran dari pemerintah untuk tahun 2013. Sementara itu, di tahun yang sama Sistem Perbendaharaan

dan Anggaran Negara (SPAN) akan diimplementasikan secara penuh. Salah satu konsep yang dikembangkan pada SPAN adalah electronic fund transfer (EFT) di mana transaksi pemerintah, khususnya pembayaran, akan dilakukan melalui sarana elektronik secara tersentralisasi. Kedua hal tersebut menjadi latar belakang perlunya penyusunan kebijakan baru

bank operasional untuk periode yang akan dimulai sejak tahun 2013. **Sistem administrasi anggaran negara** World Bank Publications Buku ini disusun sebagai bahan masukan kepada unsur pimpinan pada Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran tentang pentingnya restrukturisasi manajemen keuangan pada satker luar negeri. Risiko kurs merupakan situasi nyata

yang membayangi satker luar negeri. Ketidaksetaraan informasi (asymmetric information) dan perbedaan mata uang (currency mismatch) adalah dua faktor penyebab risiko kurs pada pengelolaan keuangan satker luar negeri. Penyempurnaan proses bisnis merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko

tersebut. Integrasi dan konsistensi arus informasi selama siklus anggaran dan optimalisasi RKUN valas yang dimiliki BUN merupakan pendekatan yang digunakan dalam restrukturisasi ini. Implementasi dari usulan pada buku ini akan membawa manfaat bagi banyak pihak yang terkait. Secara khusus, restrukturisasi ini akan memperkuat fungsi treasury pada

Ditjen Perbendaharaan. Mengingat perubahan yang diusung akan mengubah mind set dan kebiasaan, dibutuhkan dukungan penuh dari unsur pimpinan termasuk dari stakeholder yang terkait. Manajemen DIPA: Integrasi dan Interkoneksi Proses Bisnis dengan Satker Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Berkaitan dengan penyempurnaan koneksitas proses bisnis manajemen kas di Satker, maka peran Satker dalam hal perencanaan kas sangatlah penting. Dalam Modernizing Cash Management, disebutkan bahwa manajemen kas yang efektif memerlukan perencanaan arus kas jangka pendek yang akurat dan tepat waktu. Aktifitas perencanaan dan proyeksi	kas ini, di antaranya meliputi pertukaran informasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian teknis di tingkat operasional. Institusi treasury idealnya dapat memperoleh informasi dari agency (Satker) selaku entitas yang melakukan transaksi termasuk di dalamnya perikatan/komitmen serta proyeksi kas yang dibutuhkan	untuk melunasinya. Peran dan tanggung jawab Satker dalam manajemen kas di antaranya dipengaruhi oleh model sistem perbendaharaan dan mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran di suatu negara. Sedangkan mekanisme yang ditempuh institusi perbendaharaan untuk menjamin ketersediaan kas pada saat pembayaran jatuh tempo
--	--	--

<p>dipengaruhi pula oleh struktur rekening pemerintah di mana uang negara ditempatkan.</p> <p><u>Manajemen Keuangan Satuan Kerja Luar Negeri</u></p> <p>Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan</p> <p>Komitmen merupakan kewajiban yang akan menimbulkan pembayaran di masa yang akan datang berdasarkan pemenuhan kondisi atau</p>	<p>kriteria tertentu.</p> <p>Dalam SPAN Bid Document, disebutkan bahwa komitmen anggaran terjadi pada saat kontrak ditandatangani antara Satker dan rekanan untuk pengadaan barang dan jasa di masa yang akan datang atau pada saat rekanan menerima dan menyanggupi purchase order dari satker. Secara umum terdapat dua jenis komitmen. Komitmen khusus</p>	<p>(spesific commitment) adalah komitmen yang menimbulkan kewajiban pembayaran atau serangkaian pembayaran dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>Termasuk dalam komitmen khusus adalah penerbitan purchase order dan persetujuan kontrak pengadaan barang dan jasa.</p> <p>Sedangkan komitmen yang berkelanjutan (continuing commitment)</p>
---	---	--

<p>merupakan komitmen yang pembayarannya bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak didasarkan pada adanya kontrak tersendiri. Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan sejenisnya termasuk dalam continuing commitment.</p> <p>Marwanto Harjowiryo, Maestro Simfoni Perbendaharaan Bumi Aksara Integrasi dan Koneksitas proses bisnis</p>	<p>terbentuk oleh elemen-elemen proses bisnis, terutama yang dijalankan oleh institusi/unit yang berbeda. Konsep integrasi dan koneksitas ini setidaknya meliputi: 1. mekanisme input-output (transfer) yang digunakan dan dihasilkan sebuah proses bisnis, termasuk di dalamnya bentuk/media dan interface. 2. keandalan dan kesesuaian aktivitas yang berkaitan dengan</p>	<p>pengendalian intern (internal control) di masing-masing unit proses bisnis. Penentuan model koneksitas dengan proses bisnis di Satker dan koneksitasnya dilakukan dengan memperhatikan permasalahan dari praktek pada saat ini, mengkaji internasional best practice dan kesesuaiannya dengan landasan hukum yang ada (Undang-Undang). Future proses</p>
--	--	---

bisnis yang dihasilkan dari methodology tersebut di atas terutama diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Oleh karena itu, rekomendasi untuk penyempurnaan proses bisnis pada saat ini juga memperhatikan print rencana pengembangan SPAN, terutama terkait dengan modernisasi sistem informasi dan IT. Rekomendasi dari rancangan model integrasi dan koneksitas ini juga memuat detail design proses bisnis baik yang dibahas sebagai bagian dari tulisan maupun dicantumkan secara terpisah dalam Appendix.

Harmonisasi Pelaporan Berbasis Government Finance Statistics World Bank Publications Selama beberapa dekade sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan keuangan negara, Indonesia menggunakan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Dengan perkembangan pelaksanaan keuangan pemerintah di berbagai negara dan tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,

<p>mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara dengan penyusunan landasan hukum pengelolaan keuangan negara. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan komitmen bersama dalam memperbaiki sistem penganggaran</p>	<p>negara. Pelaksanaan peraturan keuangan negara perlu didukung oleh sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara (presiden) baik kepada chief financial officer (CFO) sebagai Bendahara Umum Negara maupun chief operating</p>	<p>officer (COO) sebagai pengguna anggaran. Sebagai tindak lanjut penerapan sistem manajemen penganggaran maka diluncurkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai wadah dalam menerapkan sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan negara. Modernisasi pengelolaan keuangan pemerintah memerlukan dukungan</p>
--	--	---

sistem informasi yang handal dan terintegrasi, mulai dari perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan utang, maupun pelaporan dan pengawasan. Sebagai bagian dari reformasi di bidang keuangan sejak tahun 2004 Departemen Keuangan telah merencanakan untuk melakukan reformasi sistem informasi, khususnya di bidang perbendaharaan dan penganggaran . Rencana tersebut dibiayai dengan pinjaman dari Bank Dunia dalam payung Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP) di Departemen Keuangan. Salah satu unsur utama dalam GFMRAP tersebut adalah proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN adalah proyek jangka panjang yang menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai leading institutions, meliputi pembangunan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang sesuai dengan best practices yang diharapkan, dengan didukung oleh sistem informasi yang modern,

<p>baik yang terkait dengan software maupun hardware, melibatkan dan menghubungkan an sistem informasi perbendaharaan dan anggaran di beberapa Eselon I di Departemen Keuangan, lima kementerian/lembaga negara di pusat, DPR, seluruh KPPN dan institusi pemerintah lainnya yang ditetapkan. Sistem pelaksanaan anggaran harus memenuhi sasaran dari</p>	<p>Public Expenditure Management (PEM) yaitu pengawasan pengeluaran secara menyeluruh, alokasi strategis dan efisiensi pelaksanaan. Dalam sistem pelaksanaan anggaran sebelumnya mengacu pada kepatuhan dan meyakinkan penerapan disiplin fiskal. <u>Kamus SPAN Ver 2</u> Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,</p>	<p>an, Kementerian Keuangan Sistem pembayaran, yang merupakan suatu sistem dari rangkaian panjang pengeluaran negara, adalah sistem yang dimiliki Bendahara Umum Negara (BUN) dalam mengeluarkan uang dari rekening pengeluaran untuk keperluan pembayaran kepada yang berhak. Saat ini sistem pembayaran dilakukan dengan metode tunggal yakni</p>
---	---	---

melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berfungsi sebagai bilyet giro yang menjadi dasar bagi bank untuk mendebit sejumlah dana pada rekening milik BUN dan memindahkannya ke rekening pihak ketiga. Dari rangkaian berbagai aktivitas pada sistem pembayaran, settlement SP2D merupakan akhir dari seluruh rangkaian pada sistem pembayaran. Tepat jumlah, tepat orang dan tepat waktu merupakan tiga elemen dasar yang harus dimiliki oleh sebuah sistem pembayaran. Proses penerbitan dan settlement SP2D sendiri telah mengalami banyak penyempurnaan, seperti percepatan penerbitan SP2D dan penyampaian soft copy SP2D kepada Bank Operasional. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa potensi kelemahan yang perlu dicari solusinya. Dua kelemahan yang paling dirasakan adalah tidak dapat dipastikannya kapan aliran dana pencairan SP2D dapat diterima yang berhak serta kemungkinan terjadinya retur transaksi SP2D. Meski penyebab retur telah dapat diidentifikasi, namun sejauh ini belum terdapat upaya yang

<p>komprehensif dan tuntas untuk pencegahannya. Selain dua kelemahan tersebut, aktivitas settlement SP2D saat ini masih didominasi dengan proses manual dan terlalu banyak membutuhkan intervensi manusia. Penulisan buku ini ditujukan untuk menghasilkan solusi yang sistematis dan upaya pencegahan atas berbagai permasalahan yang timbul. Penyempurnaan settlement</p>	<p>SP2D didasarkan atas penyempurnaan proses bisnis seluruh aktivitas yang terjadi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah berlaku umum di dunia perbankan. Untuk mencegah terjadinya retur - sebuah proses yang sangat memakan waktu dan biaya - diusulkan untuk menerapkan metode validasi atas data dan status rekening</p>	<p>tujuan pembayaran dengan menggunakan koneksitas dengan penyedia jaringan data perbankan. Untuk tujuan yang sama, perlu dilakukan penyempurnaan atas aplikasi satker berupa database rekening yang menyimpan data rekening pihak ketiga sehingga mengurangi aktivitas entry dan re-entry nomor rekening pada aplikasi satker termasuk pembangunan model aliran</p>
---	---	--

dan keamanan informasi data rekening dari satker kepada KPPN hingga diteruskan kepada pihak perbankan. Sejalan dengan penyempurnaan proses bisnis di atas, turut diusulkan untuk membangun relasi langsung antara rekening pengeluaran yang didebit dengan rekening penerima dana, dengan cara membebankan Rekening Pengeluaran	Kuasa BUN Pusat pada bank yang sama dengan bank pada rekening tujuan. Selain untuk mengurangi jumlah jaringan perbankan yang terlibat, juga untuk penyederhanaan jumlah rekening yang dikelola BUN dan sebagai sentralisasi settlement kas melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Implementasi berbagai usulan pada buku ini dibagi ke dalam dua periode, yakni sebelum	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan pada saat SPAN dijalankan. Periodesasi implementasi perlu dilakukan karena terdapat dua sistem yang berbeda pada dua kurun waktu yang berbeda pula. Selain untuk mendapatkan pengalaman dari setiap aktivitas baru, periodesasi tersebut juga untuk memberikan jaminan bahwa seluruh usulan penyempurna
---	---	--

<p>an dapat diimplementasikan dengan baik.</p> <p>Manajemen Komitmen: Integrasi dan Interkoneksi Proses Bisnis dengan Satker</p> <p>Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Dalam Treasury Diagnostic Toolkit, terdapat 2 (dua) model terkait dalam Pencairan Anggaran, yaitu: (1)</p>	<p>sentralisasi manajemen pembayaran dan (2) desentralisasi manajemen pembayaran. Sentralisasi pembayaran melalui Treasury memungkinkan dilakukannya pengecekan oleh Treasury untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan telah sesuai dengan alokasi anggaran (budget appropriations). Konsolidasi rekening Satker ke dalam TSA di</p>	<p>bawah kendali treasury, memungkinkan manajemen kas yang efisien dan menghindarkan suatu situasi di mana di satu sisi terdapat banyak idle cash di rekening Satker dan di sisi lain rekening BUN mengalami deficit. Struktur organisasi yang diperlukan dalam rangka sentralisasi pelaksanaan pencairan anggaran terdiri dari main treasury office di kantor pusat,</p>
--	---	---

<p>second tier treasury offices di tingkat propinsi dan (kemungkinan) third tier offices yang berada di setiap kabupaten/dis trict. K/L memproses transaksi pembayaran mereka di central level treasury office, sedangkan Satker memproses transaksi pembayarann ya di kantor treasury propinsi/kabup aten terdekat. Satker mengirimkan transaksi pengeluarann</p>	<p>ya kepada kantor treasury terdekat untuk pemrosesan pembayarann ya. Treasury akan mengirimkan transaksi pengeluaran yang telah disetujui kepada kantor cabang Central Bank terdekat di mana TSA berada, untuk melakukan pembayaran kepada vendor.</p> <p>Manajemen Perbendaharaan Negara Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,</p>	<p>an, Kementerian Keuangan Buku ini memuat materi perbendaharaan negara terkait Manajemen Aset Pemerintah, Pengelolaan Badan Layanan Umum, Pelaporan dan Pertanggungja waban, Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, serta Digitalisasi Perbendaharaan, misalnya</p>
---	--	---

aplikasi SAKTI dan Digipay. Berbagai peraturan dan perkembangan terbaru telah disesuaikan dengan kondisi terkini khususnya mulai dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada digitalisasi berbagai sistem dalam perbendaharaan negara. Basis rujukan buku ini adalah peraturan yang relevan atau berlaku saat ini dengan tambahan filosofi yang relevan.

Dengan demikian, meskipun peraturan-peraturan tersebut nantinya akan terus berubah, kerangka konseptual yang dapat diambil dari buku ini tetap akan relevan Integrasi Pelaporan Keuangan dengan Pelaporan Kinerja pada Pemerintah Pusat Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Judul :

PANDEMI COVID19 DAN DIGITALISASI UMKM Penulis : Dr.Rosnaini Daga,.SE,.MM, .CPHCM
Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 192 Halaman
No ISBN : 978-623-497-315-0 Tahun Terbit : Januari 2023
SINOPSIS
Dalam buku ini yang berjudul Pandemi Covid19 dan Digitalisasi UMKM, Selama masa pandemi Covid-19 berlangsung (awal 2020 sampai pertengahan 2022), dunia virtual

<p>menjadi jauh lebih sibuk dan ramai dari sebelumnya. Hal ini terjadi karena semakin banyak masyarakat beralih menggunakan gadget dan komputer sebagai alat penyambung hidup demi menggantikan berbagai aktivitas secara langsung. Perubahan pada masyarakat tersebut memberikan dampak pada perkembangan perekonomian dengan mempercepat</p>	<p>transformasi secara digital. dari beberapa hasil riset (BPS, Bappenas, dan World Bank) menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya sampai harus melakukan PHK. Digitalisasi UMKM ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh</p>	<p>UMKM pada masa Pandemi.19 agar UMKM tetap bisa eksisdalam mengakselera si pengembangan UMKM digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pelaku usaha UMKM melakukan inovasi dengan berjualan pada platform digital agar dapat bertahan selama masa pandemideng an pemanfaatan teknologi digital pada pertanian</p>
--	--	--

untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi biaya. Tips Digitalisasi UMKM Sederhana : 1) Riset Pasar. Pemilik usaha UMKM perlu melakukan riset pasar terlebih dahulu sebelum mengelola produk. 2) Promosi Brand. 3) Pemasaran Online, 4) Kerjasama UMKM, 5) Pengelolaan Operasional secara Digital. Sedangkan Tujuan dari adanya digitalisasi	UMKM adalah untuk membantu masyarakat dalam memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan mereka sehari-hari. Tujuan ini memberikan manfaat yang cukup efektif dalam mengoptimalkan banyak hal hingga kita tidak perlu memakan banyak waktu serta usaha untuk mencapai target dari pekerjaan kita. Seperti misalnya saat kita ingin pergi ke suatu tempat yang	terkadang belum diketahui rute pastinya, maka dengan adanya digitalisasi ini hadirlah sebuah inovasi dari para pelaku usaha dengan menciptakan berbagai macam aplikasi pencari rute atau aplikasi untuk kita bisa mengakses angkutan umum secara online. Contoh lainnya dari penggunaan teknologi dalam kegiatan bisnis jual-beli melalui proses digitalisasi adalah adanya
---	--	---

kemudahan dalam melakukan transaksi antara penjual dengan pembeli yang bisa dilakukan secara singkat. Proses ini mampu menghadirkan berbagai macam aplikasi atau media untuk keperluan proses bisnis seperti marketplace, e-commerce, dan online shop. Dengan begitu masyarakat pun tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu hanya untuk membeli atau menjual sesuatu. Bahkan meskipun kegiatan jual-beli ini melibatkan kedua negara yang berbeda. Blueprint Proses Bisnis Modul Penerimaan Negara Generasi II (MPN G2) Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Sejalan dengan amanat Reformasi Keuangan Negara yang ditandai dengan lahirnya Paket UU di bidang Keuangan Negara, penerapan akuntansi berbasis akrual di bidang pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja di bidang perencanaan dan penganggaran menjadi hal penting yang mendasari pencapaian pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Dalam siklus pengelolaan keuangan

<p>Negara tersebut, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban, diperlukan kodifikasi anggaran dan pelaporan keuangan yang saat ini berupa Bagan Akun Standar sebagai bentuk klasifikasi anggaran dan pelaporan keuangan. Terdapat amanat Undang-undang di bidang Keuangan Negara yang</p>	<p>sampai saat ini belum diimplementasikan secara penuh, antara lain adalah penerapan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah pada aspek perencanaan dan penganggaran serta penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada aspek pelaporan. Untuk mencapai beberapa poin penting tersebut telah dilakukan</p>	<p>Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang mencakup Prioritas Nasional, Restrukturisasi Program dan Kegiatan, Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, serta Format Baru RKA-KL yang akan mulai diterapkan pada tahun 2010. Selain itu, pada bidang pelaporan, pelaksanaan penerapan</p>
--	--	--

<p>SAP berbasis akrual ini secara signifikan akan berpengaruh terhadap Manajemen Aset Pemerintah, khususnya dalam desain Register Aset, dan pencantuman nilai aset di dalam neraca. <i>Alternative Paths to Public Financial Management and Public Sector Reform</i> Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan</p>	<p>Buku ini menggunakan pendekatan praktik dalam pelaksanaan perbendaharaan negara. Basis rujukannya adalah peraturan yang relevan atau berlaku saat ini dengan tambahan filosofi di dalamnya. Buku ini menjadi bagian dari penampungan pengetahuan dalam upaya menciptakan knowledge management di bidang perbendaharaan negara. Manajemen perbendaharaan</p>	<p>negara dalam buku ini menyajikan materi mengenai Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara, Manajemen Kas, Manajemen Piutang, Manajemen Persediaan, Manajemen Investasi, Manajemen Utang, dan Manajemen Proyek yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, berbagai peraturan dan perkembangan baru telah disesuaikan dengan</p>
---	--	---

<p>kondisi terkini. <u>Akuntansi dan Pelaporan: Integrasi dan Interkoneksi Proses Bisnis dengan Satker</u> Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Salah satu wujud dari proses reformasi pengelolaan keuangan negara adalah implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN merupakan suatu sistem</p>	<p>yang terintegrasi yang, mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, serta menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai leading institutions, berdasarkan atas international best practices, dengan didukung oleh teknologi informasi yang canggih</p>	<p>dan modern. Banyaknya masalah tentang konsistensi dan pemeliharaan data anggaran dan perbendaharaan menjadi alasan utama digulirkannya SPAN, sehingga melalui SPAN diharapkan kualitas pemeliharaan dan konsistensi data akan meningkat, karena data telah terintegrasi dalam satu database. Manajemen Pembayaran atau Payment Management</p>
--	--	--

<p>(PM) merupakan salah satu modul yang berperan sebagai gerbang utama pengeluaran pemerintah dalam rangka menunjang program pembangunan nasional. Manajemen Pembayaran akan memproses tagihan (dalam bentuk Resume Tagihan dan Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh Satuan Kerja (Satker) dan melakukan proses pencairan</p>	<p>dana dari Rekening Pengeluaran Pemerintah kepada pihak yang berhak melalui proses penerbitan SP2D/SPT. Dalam pelaksanaannya, modul PM tidaklah dapat berdiri sendiri tanpa terintegrasi dengan modul-modul yang lainnya dalam menjamin terlaksananya proses pembayaran yang benar dan aman. Untuk menjamin keamanan dan kebenaran transaksi</p>	<p>pembayaran, perlu diciptakan suatu mekanisme kontrol yang dapat mengontrol proses pembayaran tersebut. Mekanisme kontrol tersebut dapat dilaksanakan melalui integrasi antara modul PM dengan modul MoSA dan modul BC. Selain itu, koneksitas modul PM dengan modul CM dan modul GL and Reporting diperlukan dalam rangka pencairan dana dan</p>
--	--	---

<p>proses akuntansi dan pelaporan atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan. Modul PM akan memberikan input terhadap jumlah dana yang telah dicairkan dari rekening BUN, sehingga CM dapat melihat jumlah dana yang masih tersedia dan mengelola kas negara dengan lebih baik. Dalam hal integrasi dengan modul GL and Reporting, modul PM akan memberikan input pada</p>	<p>laporan realisasi pencairan dana sehingga modul GL and Reporting dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat. Modul ini disusun untuk memberikan gambaran umum terkait dengan penyempurnaan proses bisnis Manajemen Pembayaran secara komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai acuan di dalam tahapan proses implementasi SPAN.</p>	<p><i>Buku Besar dan Bagan Akun Standar pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Asian Development Bank</i> Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah andal</p>
--	---	---

<p>(reliable). Laporan keuangan dapat dikatakan andal jika memenuhi salah satu karakteristiknya, yaitu “dapat diverifikasi” (verifiability). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan tentang pengertian “dapat diverifikasi” sebagai berikut, “informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji,</p>	<p>dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh”. Demikian pula halnya dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang merupakan konsolidasi/gabungan antara laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK-KL) dengan laporan keuangan Bendahara Umum Negara</p>	<p>(LK BUN). LKPP harus memenuhi karakteristik andal sehingga memenuhi kualitas yang dikehendaki, tidak menyesatkan dan berguna bagi para penggunaanya (users). Untuk memperoleh laporan keuangan yang dapat diandalkan perlu dilakukan prosedur dan mekanisme untuk meneliti keakuratan pencatatan data akuntansinya. Salah satu cara atau mekanismenya</p>
---	---	--

<p>a adalah dengan melakukan proses rekonsiliasi sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006. PP tersebut mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan harus diselenggarakan sistem pengendalian intern yaitu dengan menciptakan prosedur rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang</p>	<p>diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Sementara itu, Perdirjen No. 36/Pb/2009 menjelaskan tentang pengertian rekonsiliasi sebagai: “proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang</p>	<p>berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama”. Mekanisme rekonsiliasi ini menjadi relevan ketika suatu laporan dihasilkan dari dokumen sumber yang sama namun diproses melalui dua sistem yang berbeda (serta disimpan dalam dua database yang berbeda pula). Hal inilah yang terjadi dalam proses bisnis saat ini (existing business process). Saat ini, laporan keuangan dihasilkan</p>
---	---	--

<p>dengan menggunakan dua sistem akuntansi yang berbeda, Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Kementerian Negara/Lemba ga dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA BUN) di Kementerian Keuangan. Dalam konteks pengembangan SPAN, penerapan sistem akuntansi dan penggunaan database akan mengalami perubahan. Database yang selama ini terpisah-</p>	<p>pisah akan digantikan dengan satu database yang terintegrasi (SPAN Integrated Database). Sementara itu, sistem akuntansi, khususnya SiAP (Sistem Akuntansi Pusat) yang terdiri dari dua sub sistem, SAU (Sistem Akuntansi Umum) dan SAKUN (Sistem Akuntansi Kas Umum Negara) akan direposisi menjadi satu sistem akuntansi yang terpadu tanpa</p>	<p>mengurangi fungsi dari sistem lama dalam menghasilkan laporan keuangan. Berangkat dari reformasi dan perubahan tersebut, maka akan menjadi lebih relevan untuk meninjau kembali perlunya proses rekonsiliasi laporan keuangan saat ini yang dilakukan dalam empat level/tingkat. <i>Public Financial Management Systems—Indonesia</i> Direktorat Sistem</p>
---	--	--

<p>Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Reformasi di bidang keuangan Negara yang telah dilaksanakan sejak bergulirnya Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Proses</p>	<p>pengelolaan keuangan negara selanjutnya dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari pelaksanaan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam rangka mendukung perwujudan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan semangat reformasi di bidang pengelolaan keuangan</p>	<p>Negara, maka business process improvement adalah hal utama yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan Negara yang profesional, transparan dan akuntabel. Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah dengan pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan Negara dan</p>
---	--	---

penyampaian laporan keuangan pemerintah yang andal dan tepat waktu. Hal ini dapat dicapai dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan akuntansi sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah.

Manajemen Keuangan Anggaran Transfer ke Daerah pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

Negara Bumi Aksara Pembangunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) - yang akan menjadi sistem manajemen keuangan dalam pengelolaan APBN di tahun 2012 - akan membawa implikasi pada perubahan proses bisnis pengelolaan anggaran. Meski desain utama pembangunan SPAN berada pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), perubahan yang diusung akan berpengaruh pada proses bisnis di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah. Hal tersebut adalah suatu yang wajar mengingat bahwa nantinya seluruh mekanisme penganggaran dan penyaluran APBN akan

<p>melalui sistem dan prosedur yang terdapat pada SPAN. Di dalam kajian ini, poin-poin penting terkait perubahan proses bisnis pengelolaan Transfer ke Daerah adalah (i) pemberian akses langsung ke dalam SPAN secara real time dan online bagi pejabat/petugas pengelola anggaran Transfer ke Daerah pada DJPK, (ii) penggunaan kode satker dengan kode lokasi provinsi/kabupaten/kota penerima</p>	<p>dana sehingga halaman II DIPA sudah terperinci per propinsi/kabupaten/kota, (iii) kode lokasi sebagaimana disebut pada butir (ii) adalah mengacu pada kode daerah yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, (iv) reklasifikasi akun untuk tiap jenis anggaran Transfer ke Daerah dari satu akun menjadi beberapa akun dan (v) penyaluran dana bagi hasil didasarkan</p>	<p>atas realisasi penerimaan. Kajian ini dibatasi pada cakupan pengelolaan transfer ke daerah yang saat ini menjadi tugas DJPK. Namun demikian, sebagai bagian dari Bagian Anggaran 999, anggaran Transfer ke Daerah mengambil porsi yang signifikan terhadap anggaran belanja negara. Dengan demikian, integrasi proses bisnis dan informasi pengelolaan</p>
---	---	---

Anggaran Transfer ke Daerah ke dalam SPAN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan	pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Keberhasilan pembangunan interkoneksi proses bisnis	antara DJPK selaku satker dan SPAN, ke depannya, akan menjadi cikal bakal integrasi pengelolaan keuangan negara secara nasional.
--	---	--